

JURNAL PROMOTIF PREVENTIF

PERAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING

The Role of Cross-Sectoral Coordination in Convergence Actions for Reducing Stunting

Tien Mastina⁽¹⁾, Mitra⁽²⁾

⁽¹⁾ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

⁽²⁾ Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Article Info

Article History

Received: 15 Jan 2023

Revised: 25 Jan 2023

Accepted: 30 Jan 2023

ABSTRACT / ABSTRAK

The government has formulated the National Strategy for the Acceleration of Stunting Prevention. There are five pillars in the stunting reduction policy framework. The third pillar focuses on convergence through coordinating and consolidating central, regional and village activity programs. The purpose of the study was to analyze the implementation of coordination in stunting prevention in five districts in Riau Province, namely Rokan Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, and Meranti Islands. This study is a descriptive study using secondary data from the Bapedalitbang 2020 stunting performance assessment. The selection of strategies and policies uses weighting. The study results indicate that the coordination mechanism across sectors and programs in stunting convergence action is not yet optimal. No regulations strengthen villages in carrying out convergence actions in each district. Coordination in Cross-Sector Convergence Actions in Villages where stunting focuses vertically and horizontally, from the highest leadership to the village level, through active communication and coordination between commitment-making officials and field implementers. Village governments must be encouraged to innovate in coordinating stunting prevention according to regional-specific characteristics involving various elements of society.

Keywords: *Convergence action, coordination, cross-sectoral, stunting, performance assessment*

Pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Terdapat lima pilar dalam kerangka kebijakan penurunan stunting. Pilar ke tiga berfokus konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program kegiatan pusat, daerah dan desa. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi dalam pencegahan stunting di lima Kabupaten di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan data sekunder dari penilaian kinerja stunting Bapedalitbang Tahun 2020. Pemilihan strategi dan kebijakan memakai pembobotan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam aksi konvergensi stunting belum optimal, belum ada regulasi yang memperkuat desa dalam melaksanakan aksi konvergensi di masing-masing kabupaten. Koordinasi dalam Aksi Konvergensi Lintas Sektor di Desa Lokus Stunting baik secara vertikal maupun horizontal, dari pimpinan tertinggi, sampai ke tingkat desa melalui komunikasi dan koordinasi yang aktif antar pejabat pembuat komitmen dengan pelaksana di lapangan. Pemerintahan desa perlu didorong melakukan inovasi dalam melakukan koordinasi dalam pencegahan stunting sesuai karakteristik spesifik daerah melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Kata kunci : Aksi konvergensi, koordinasi, lintas sektor, stunting, penilaian kinerja

Corresponding Author:

Name : Mitra

Afiliate : Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Address : Jl. Mustapa Sari No. 5 Tangkerang Selatan Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Email : mitra@htp.ac.id

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kekurangan gizi kronis dan adanya infeksi berulang pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) (Achadi, Achadi and Aninditha, 2020). Faktor risiko terjadinya stunting antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi dan kemiskinan (Kustanto, 2021), faktor lingkungan yang buruk (Vilcins, Sly and Jagals, 2018), ketersediaan air bersih (Yenita *et al.*, 2021), kondisi ibu ketika hamil seperti anemia dan kurang energy kronis (Khairunisa *et al.*, 2022) serta penyakit infeksi berulang yang dialami balita (Purnamasari, Sartika and Sudarti, 2022). Balita dinyatakan stunting apabila tinggi badannya lebih pendek untuk usianya atau kurang dari -2 standar deviasi terhadap median pertumbuhan anak menurut *World Health Organization* (WHO) (De Onis *et al.*, 2019). Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, seperti tidak terpenuhinya gizi yang dibutuhkan dan terkena penyakit infeksi berulang dalam jangka waktu lama (kronis) (Mitra, 2015).

Pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional (STRANAS) percepatan penanggulangan stunting yang disebut sebagai Stranas *Stunting*. Stranas Stunting merupakan dokumen acuan yang digunakan untuk memastikan koordinasi seluruh intervensi secara konvergen bagi seluruh pemangku kepentingan. Intervensi mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik di fokuskan pada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun atau rumah tangga pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK). Untuk mendukung hal tersebut maka ditetapkan lokasi fokus stunting di kabupaten/kota prioritas sejak tahun 2018 yang telah dilakukan secara bertahap, termasuk di Provinsi Riau (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2018).

Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting menyatakan bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas, dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan pemangku kepentingan. Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2019, Kementerian Kesehatan RI, telah melaksanakan Studi untuk membantu percepatan intervensi masalah gizi. Sesuai Perpres nomor 72 Tahun 2021, menunjukkan adanya penurunan prevalensi balita stunting secara Nasional ditargetkan sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2019, menyatakan bahwa prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 27,7%. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa persentase balita stunting Provinsi Riau sebesar 27,35% dan tersebar di 12 kabupaten/kota (Kementerian Kesehatan RI, 2019a). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi Stunting di Provinsi Riau sebesar 22,3%. Prevalensi Stunting tertinggi berada di Kabupaten Rokan Hilir yakni sebesar 29,7%, diikuti kabupaten Inderagiri Hilir sebesar 28,4%. Prevalensi stunting di bawah 20% yakni Kota Pekanbaru 11,4% dan Kabupaten Siak sebesar 19,0% (Kementerian Kesehatan RI, 2021)

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting adalah penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan (Nita and Bait, 2020). Salah satu pilar dalam stranas adalah koordinasi, dan konsolidasi antara program pusat, kabupaten/kota dan Desa. Koordinasi lintas sektor sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan aksi konvergensi secara optimal, sinkronisasi lintas program dalam penanganan stunting (Permanasari *et al.*, 2020). Koordinasi yang dilakukan di lima Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti mulai dari pimpinan tertinggi yaitu Bupati sebagai pimpinan daerah, Sekretaris Daerah (Sekda), antar pejabat di tingkat eselon II, pejabat di bawahnya hingga seterusnya sampai ke tingkat tapak, dalam hal ini desa. Koordinasi yang terjalin dalam suatu lingkaran yang tak terpisahkan ini harus melibatkan semua pihak sehingga intervensi dalam aksi konvergensi dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat ke sasaran.

Komitmen dari para pimpinan daerah berperan penting dalam proses koordinasi, yaitu untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di daerah (Abbas and Badan, 2020). Komitmen dari pimpinan daerah mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, dan jajaran pimpinan perangkat daerah dalam penanganan program dan kegiatan stunting sudah berjalan, namun belum optimal ke seluruh atau lintas Perangkat Daerah terkait. Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) sebagai koordinator dalam proses perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam mendisain dan merumuskan konsep koordinasi di lapangan agar pelaksanaan program menjadi konvergen dan berkesinambungan (Fahrizanur, Kalalinggi and Burhanudin, 2017).

Aksi konvergensi penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui delapan aksi konvergensi yaitu (1) analisis situasi, (2) (rencana kegiatan), (3) Rembuk Stunting, (4) Perwali/Perbup Peran Desa/Kelurahan, (5) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, (6) Sistem Manajemen Data, (7) Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, dan (8) Review Kinerja Tahunan. Delapan aksi konvergensi tersebut dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Permasalahan dalam koordinasi masih ditemukan pada berbagai tingkatan di Kabupaten/kota di Provinsi Riau, yaitu dari atas ke bawah (vertikal), dalam tingkat yang sama (horizontal), dan dari bawah ke atas (*bottom up*). Koordinasi yang dijalankan oleh lintas sektor masih belum optimal. Tiga belas OPD sebagai pelaksana intervensi spesifik dan sensitif masih berjalan sendiri-sendiri, belum terbentuk harmonisasi dan keserasian dari program yang dilaksanakan. Koordinasi yang belum optimal ini menyulitkan proses pemantauan di lapangan. Hal ini tentunya dapat menyebabkan tidak sampainya program tersebut ke tingkat penerima manfaat sehingga tidak terjadi perbaikan status gizi masyarakat. Pengkajian dilakukan di semua level koordinasi, mulai dari pimpinan tertinggi (Bupati), Sekda, Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Eselon II antar Perangkat Daerah, pemegang program di Perangkat Daerah, pengelola program di puskesmas, kader posyandu, hingga ke pengelola program di desa. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi dalam aksi konvergensi penurunan stunting di 5 (lima) kabupaten lokus stunting di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Kampar dan Kepulauan Meranti Tahun 2020.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan data sekunder dari hasil penilaian kinerja yang meliputi penelusuran literatur dan dokumen penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Bapedalitbang Provinsi Riau. Evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan indikator dan periode waktu yang telah ditetapkan. Dari 8 Aksi konvergensi stunting, Aksi yang terkait dengan koordinasi lintas sector berada pada Aksi 1 (Analisis situasi), Aksi 2 (Rencana Kegiatan), Aksi 3 (Rembuk Stunting), Aksi 4 (Perwali/Perbup Peran desa/kelurahan) dan Aksi 8 (Review Kinerja Tahunan). Kelima Aksi ini ditelusuri lebih lanjut melalui penelusuran dokumen penilaian kinerja stunting tahun 2020 untuk mengetahui aspek koordinasi lintas sector dalam aksi konvergensi penurunan stunting yang dilakukan di 5 (lima) Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yaitu : Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti. Analisis Data menggunakan studi literatur yang ada dan tabel hasil penilaian kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan Stunting di 5 (lima) kabupaten. Mengidentifikasi strategi yang telah ada sebelumnya dan perubahan-perubahan lingkungan yang dihadapi dan masih mungkin terjadi di masa mendatang. Keseluruhan proses ini digunakan untuk mendapatkan rekomendasi strategi dan kebijakan terkait koordinasi dan konvergensi penanganan stunting di 5 (lima) Kabupaten lokus stunting di Provinsi Riau Tahun 2020..

HASIL

Pada Tahun 2020 telah ditetapkan 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagai Kabupaten lokus penanganan stunting yaitu : Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Pelalawan. Jumlah desa/kelurahan lokus ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota, secara detail dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah Desa/Kelurahan Lokus Stunting di Lima Kabupaten se-Provinsi Riau Tahun 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan Lokus Stunting	
	2020	2021
Rokan Hulu	10	10
Rokan Hilir	16	15
Pelalawan	11	7
Kampar	19	18
Kepulauan Meranti	30	25
Provinsi Riau	86	75

Sumber : Aksi Bangda Provinsi Riau, 2020-2021

Tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah desa lokus stunting yang paling banyak pada tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 30 desa. Hal ini menggambarkan besaran jumlah balita stunting cukup banyak di daerah ini, sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, di mana angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti

yaitu 26,93% (Rilis BPS, 2021), diikuti kabupaten Rokan Hulu 10,53%, kemudian Kabupaten Pelalawan 9,62%, Kabupaten Kampar 7,71% dan Kabupaten Rokan Hilir 7,01%. Lokus stunting ditetapkan berdasarkan SK Bupati berdasarkan analisis situasi dan kondisi di masing masing kabupaten, oleh karena itu banyaknya desa lokus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin di Lima Kabupaten se-Provinsi Riau Tahun 2018-2020.

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Kab/Kota)		
	2018	2019	2020
Rokan Hulu	10,95	10,53	10,31
Rokan Hilir	7,06	7,01	6,72
Pelalawan	9,73	9,62	9,16
Kampar	8,18	7,71	7,38
Kepulauan Meranti	27,79	26,93	25,28
Provinsi Riau	7,39	7,08	6,82

Sumber : Rilis BPS Provinsi Riau, Tahun 2018- 2020

Berdasarkan Penilaian Kinerja 5 Kabupaten Lokus Stunting tahun 2020 khususnya dalam aspek Koordinasi lintas sektor dalam penurunan dan pencegahan balita stunting adalah sebagai berikut :

Kabupaten Rokan Hulu

Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu dilakukan dengan mengidentifikasi aspek penilaian pada kinerja terkait pelaksanaan Koordinasi penurunan Stunting, seperti yang disajikan pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Hasil penilaian Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

Aksi Konvergensi	Penilaian Kinerja
Aksi 1	Pelaksanaan koordinasi antar perangkat Daerah (Dinas/Badan), pada level yang sama (horizontal) dan koordinasi vertikal dari atas ke bawah, mulai dari Pimpinan sampai ke Desa masih perlu perbaikan dan dioptimalkan.
Aksi 2	Pengintegrasian antara rencana kegiatan ke dalam dokumen perencanaan telah berjalan dengan baik dan mengikuti proses mekanisme perencanaan.
Aksi 3	Komitmen pimpinan daerah dan stekholder terkait menunjukkan partisipasi yang aktif selama pelaksanaan Rembuk Stunting. Adanya komitmen publik dalam penurunan stunting. Peran Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan intervensi perlu ditingkatkan.
Aksi 4	Penguatan koordinasi di laksanakan dalam bentuk penyiapan regulasi dalam mengoptimalkan peran desa dan masyarakat dalam penurunan stunting, dalam hal ini mengatur jalannya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Perangkat Daerah terkait, dengan fasilitator dan pendamping program.
Aksi 8	Menggambarkan keberadaan berjalan atau tidaknya koordinasi pelaksanaan anggaran di masing-masing perangkat daerah dalam

intervensi penurunan stunting, sesuai program dan kewenangan Perangkat daerah, ditandai dengan terlaksananya 8 aksi konvergensi penurunan stunting yang menysasar kepada rumah tangga kepada 1000 HPK.

Sumber data: Olahan Penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting Tahun 2020

Kabupaten Kampar

Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi penurunan Stunting di Kabupaten Kampar dilakukan dengan mengidentifikasi aspek penilaian kinerja terkait pelaksanaan Koordinasi penurunan Stunting, seperti yang disajikan pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 4. Hasil penilaian Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar Tahun 2020

Aksi Konvergensi	Penilaian Kinerja
Aksi 1	Pelaksanaan koordinasi antar perangkat Daerah (Dinas/Badan), pada level yang sama (horizontal) dan kooordinasi vertikal dari atas ke bawah, mulai dari Pimpinan sampai ke Desa berjalan dengan baik, regulasi penguatan pengkoordinasian perangkat daerah pada level horizontal, antar perangkat daerah dan lintas program menunjukkan kondisi baik, hal ini didukung dengan adanya SK Tim koordinasi mulai dari perencanaan, penganggaran pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan ke Rumah tangga 1000 HPK. Ketersediaan SDM pelaksana program sudah mencukupi, kabupaten Kampar sudah melakukan perbaikan koordinasi antar OPD, Kabupaten dengan Desa, melalui SK Tim Koordinasi Pelaksanaan Stunting di tingkat Desa, yang ditanda tangani oleh Bupati. Kabupaten Kampar sudah menyiapkan rincian kegiatan masing-masing desa yang dikoordinasikan oleh Dinas kesehatan dan Bappeda.
Aksi 2	Kabupaten Kampar sudah mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam dokumen Perencanaan dan penganggaran, namun belum sepenuhnya perencanaan dan penganggaran memprioritaskan program kegiatan yang fokus kepada rumah tangga 1000 HPK. Masih ditemukan kegiatan-kegiatan yang tidak menysasar kepada 1000 HPK.
Aksi 3	Rembuk Stunting, ditunjukkan dengan komitmen Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati dan perangkat nya, komitmen publik dalam penurunan stunting serta Peran Desa dan Kecamatan untuk meningkatkan intervensi program dan kegiatan ditingkat desa.
Aksi 4	Kabupaten Kampar telah menyediakan dukungan regulasi untuk megoptimalkan peran desa dan masyarakat dalam penurunan stunting. Dukungan tersebut berupa Regulasi tentang kewenangan desa dalam intervensi gizi melalui alokasi APBDesa; peran Kecamatan dalam mendukung pemerintahan desa; dukungan dan mobilisasi bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM); penguatan Koordinasi antara Desa dengan OPD terkait, dengan fasilitator, dan pendamping program; meningkatkan peran kelembagaan masyarakat (Posyandu, PAUD, PKK dsb); dukungan kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat desa, sudah

Aksi 8 berjalan dengan baik. Pelaksanaan 8 aksi Konvergensi penurunan stunting, sudah berjalan sesuai dengan perencanaan tahunan, intervensi program dan kegiatan yang menysasar kepada rumah tangga 1000 HPK, serta cakupan intervensi yang diprioritaskan.

Sumber data: Olahan Penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting Tahun 2020

Kabupaten Pelalawan.

Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi penurunan Stunting di Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan mengidentifikasi aspek penilaian kinerja terkait pelaksanaan Koordinasi penurunan Stunting, seperti yang disajikan pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Hasil penilaian Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Aksi Konvergensi	Penilaian Kinerja
Aksi 1	Pada proses perencanaan dan penganggaran, perangkat daerah belum mengarahkan kegiatan yang menysasar kepada lokus stunting dan rumah tangga 1000 HPK, proses perencanaan belum sepenuhnya mengakomodir program kegiatan intervensi stunting, ketersediaan dan kualitas SDM dalam pelaksanaan intervensi belum sepenuhnya mencukupi baik dari segi jumlah dan kualitas. Masih banyak masyarakat yang belum dapat menerima akses layanan yang diberikan. Koordinasi masih belum optimal, baik antar perangkat daerah maupun lintas sektor terkait. Belum sepenuhnya program kegiatan yang di rencanakan mengarah kepada lokus dan rumah tangga 1000 HPK sebagai penerima manfaat.
Aksi 2	Kabupaten Pelalawan mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam dokumen Perencanaan dan penganggaran, namun belum sepenuhnya penganggaran memprioritaskan program kegiatan yang fokus dan menysasar kepada rumah tangga 1000 HPK. Masih ditemukan kegiatan-kegiatan yang tidak menysasar kepada 1000 HPK.
Aksi 3	Kegiatan yang dilakukan adalah rembuk stunting yang berfokus pada level pimpinan daerah (Bupati, Sekda dan Kepala OPD) perangkat daerah tingkat kabupaten. Dalam pelaksanaannya Pimpinan dan perangkat daerah belum sepenuhnya menunjukkan komitmen yang tinggi, komitmen belum diikuti dengan adanya kesepakatan penyusunan program dan kegiatan dalam intervensi penurunan stunting. Belum dilibatkannya secara aktif masyarakat dalam pelaksanaan rembuk. Peran kecamatan dan Desa belum sepenuhnya terlibat secara aktif dalam kegiatan aksi konvergensi penurunan stunting. Publikasi dan sosialisasi belum berjalan secara menyeluruh, dan sampai kemasyarakat penerima manfaat (rumah tangga 1000 HPK).
Aksi 4	Koordinasi antara tingkat pemerintahan Kabupaten dengan Kecamatan dan Desa sudah berjalan baik, sudah ada regulasi bagi desa dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai kewenangannya. Begitu juga peran kelembagaan masyarakat sudah berkontribusi secara baik, dukungan untuk kampanye

Aksi 8	<p>publik dan komunikasi untuk perubahan perilaku di tingkat desa sudah berjalan baik.</p> <p>Pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting, sudah berjalan sesuai dengan perencanaan tahunan, intervensi program dan kegiatan yang menysasar kepada rumah tangga 1000 HPK, serta cakupan intervensi yang diprioritaskan. Hanya saja ada beberapa cakupan belum terpenuhi sesuai indikator yang ditetapkan (20 indikator), belum diidentifikasi program yang efektif dan kurang efektif untuk tahun selanjutnya dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting.</p>
--------	--

Sumber data: Olahan Penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting Tahun 2020

Kabupaten Rokan Hilir.

Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi penurunan Stunting di Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan mengidentifikasi aspek penilaian kinerja terkait pelaksanaan Koordinasi lintas sktor pada aksi penurunan Stunting, seperti yang disajikan pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Hasil penilaian Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

Aksi konvergensi	Penilaian Kinerja
Aksi 1	<p>Pada proses perencanaan dan penganggaran, perangkat daerah belum mengarahkan kegiatan yang menysasar kepada lokus stunting dan rumah tangga 1000 HPK, proses perencanaan belum sepenuhnya mengakomodir program kegiatan intervensi stunting, ketersediaan dan kualitas SDM dalam pelaksanaan intervensi belum sepenuhnya mencukupi baik dari segi jumlah dan kualitas. Masih banyak masyarakat yang belum dapat menerima akses layanan yang diberikan. Koordinasi masih belum optimal, baik antar perangkat daerah maupun lintas sektor terkait. Belum sepenuhnya program kegiatan yang di rencanakan mengarah kepada lokus dan rumah tangga 1000 HPK sebagai penerima manfaat.</p>
Aksi 2	<p>Kabupaten Rokan Hilir sudah mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam dokumen Perencanaan dan penganggaran, dalam aksi ini belum sepenuhnya penganggaran dengan memprioritaskan program kegiatan yang fokus kepada rumah tangga 1000 HPK. Masih ditemukan kegiatan-kegiatan yang tidak menysasar kepada 1000 HPK.</p>
Aksi 3	<p>Kegiatan yang dilakukan adalah rembuk stunting yang berfokus pada level pimpinan daerah (Bupati, Sekda dan Kepala OPD) perangkat daerah tingkat kabupaten. Dalam pelaksanaannya Pimpinan dan perangkat daerah belum sepenuhnya menunjukkan komitmen yang tinggi, komitmen belum diikuti dengan adanya kesepakatan penyusunan program dan kegiatan dalam intervensi penurunan stunting. Belum dilibatkannya secara aktif masyarakat dalam pelaksanaan rembuk. Peran kecamatan dan Desa belum sepeuhnya terliabt secara aktif dalam kegiatan aksi konvergensi penurunan stunting. Publikasi dan sosialisasi belum berjalan secara menyeluruh, dan sampai kemasyarakat penerima manfaat</p>

Aksi 4	(rumah tangga 1000 HPK). Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang menangani aksi konvergensi penurunan stunting
Aksi 8	Pelaksanaan 8 aksi Konvergensi penurunan stunting, sudah berjalan sesuai dengan perencanaan tahunan, intervensi program dan kegiatan yang menysasar kepada rumah tangga 1000 HPK, serta cakupan intervensi yang diprioritaskan. Hanya saja ada beberapa cakupan belum sesuai indikator yang ditetapkan (20 indikator), belum diidentifikasi program yang efektif dan kurang efektif untuk tahun selanjutnya dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting.

Sumber data: Olahan Penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting Tahun 2020

Kabupaten Kepulauan Meranti

Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan dengan mengidentifikasi aspek penilaian kinerja terkait pelaksanaan Koordinasi lintas sektor penurunan Stunting, seperti yang disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Hasil penilaian Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

Aksi konvergensi	Penilaian Kinerja
Aksi 1	Pelaksanaan koordinasi antar perangkat Daerah (Dinas/Badan), pada level yang sama (horizontal) dan kooordinasi vertikal dari atas ke bawah, mulai dari Pimpinan sampai ke Desa sudah bejalan baik.
Aksi 2	Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam dokumen Perencanaan dan penganggaran, perencanaan dan penganggaran sudah memprioritaskan program kegiatan yang fokus kepada rumah tangga 1000 HPK. Kegiatan sudah menysasar kepada rumah tangga 1000 HPK. Untuk lebih optimalnya kegiatan lintas OPD perlu dicermati kembali terhadap intervnsi spesifik, sebagai komponen pendukung aksi penuruan stunting.
Aksi 3	Pelaksanaan aksi rembuk stunting yang melibatkan unsur Perangkat Daerah lintas sektor telah berjalan baik, dan telah menunjukkan komitmen keikutsertaan pimpinan daerah (Bupati, Sekda dan Kepala OPD dan perangkat Desa). Komitmen dalam Rembuk Stunting diikuti dengan adanya kesepakatan penyusunan program dan kegiatan dalam intervensi penurunan stunting yang ditandai dengan penanda tanganan Berita Acara. Dalam acara ini telah melibatkan secara aktif masyarakat, Peran Kecamatan dan Desa telah sepeuhnya terlibat secara aktif dalam kegiatan aksi konvergensi penurunan stunting. Publikasi dan sosialisasi telah dilaksanakan secara menyeluruh, dan sampai kemasyarakat penerima manfaat (rumah tangga 1000 HPK).
Aksi 4	Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang menangani aksi konvergensi penurunan stunting

Aksi 8	Pelaksanaan 8 aksi Konvergensi penurunan stunting, sudah berjalan sesuai dengan perencanaan tahunan, intervensi program dan kegiatan sudah menasar kepada rumah tangga 1000 HPK, serta cakupan intervensi yang diprioritaskan. Hanya saja ada beberapa cakupan belum sesuai indikator yang ditetapkan (20 indikator), permasalahan yang menjadi urusan sudah diintegrasikan dala pelaksanaan aksi konvergensi yang dikoordinasikan kepada perangkat daerah terkait sesuai kewenangan, sudah diidentifikasi program yang efektif dan kurang efektif, tahun selanjutnya dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting.
--------	--

Sumber data: Olahan Penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting Tahun 2020

Hasil penilaian kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi di 5 (lima) kabupaten lokus yaitu; Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti, peringkat I pelaksanaan aksi konvergensi 1-8 secara keseluruhan dapat digambarkan pada Tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Penilaian Kinerja dan Peringkat Kabupaten Lokus Stunting 2020 di Provinsi Riau

No	Kabupaten Lokus	Total Skor	Peringkat	Keterangan
1	Kepulauan Meranti	84	I	
2	Kampar	76	II	*) Inovasi
3	Rokan Hulu	76	III	
4	Rokan Hilir	72	IV	
5	Pelalawan	70	V	

Sumber data: Olahan Penilaian kinerja konvergensi penurunan stunting tahun 2020

Berdasarkan hasil penilaian oleh tim panelis, secara umum yang menduduki peringkat I adalah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan skor 84, sedangkan peringkat II dan III diraih oleh Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu dengan skor yang sama yaitu 76, dalam hal skor sama, diantar 2 kabupaten ini penentuan nya dilakukan dengan menilai aspek inovasi yang dilakukan ke 2 kabupaten diatas, dalam hal ini Kabupaten Kampar memiliki inovasi yang lebih unggul dibandingkan kabupaten Rokan Hulu.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi di 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti telah dilakukan Penilaian Kinerja terhadap 8 (delapan) aksi Konvergensi yang melibatkan perangkat daerah lintas sektor. Aksi intervensi penurunan stunting memegang peran sangat penting, yang mana intervensi sensitif yang dikoordinasikan pada perangkat daerah bidang kesehatan, di lima kabupaten, secara umum sudah memperlihatkan kemajuan dan berjalan dengan baik. Koordinasi pada intervensi spesifik yang di pimpin oleh Dinas Kesehatan sudah memenuhi sesuai intervensi yang dapat berperan dalam pelaksanaan

aksi penurunan stunting sebesar 30%, sedangkan intervensi sensitif memegang peranan sebesar 70% (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2018), dapat dikatakan berhasil apabila koordinasi perangkat daerah lintas sektor dan lintas program dapat berjalan secara optimal.

Praktek baik yang dilakukan berbagai daerah dapat menjadi pembelajaran seperti yang telah dilakukan oleh pimpinan daerah, seperti Bupati Kabupaten Gorontalo dan Bupati Kabupaten Banggai, Sulawesi Selatan. Prioritas penanganan stunting tergambar dalam visi dan misi, dokumen RPJMD, Renstra dan Renja OPD, SK tim koordinasi percepatan penurunan stunting, SK penetapan lokus penanganan stunting untuk dua kabupaten tersebut (Pembanggai, 2019; Pemkab Gorontalo, 2019). Hasil studi evaluasi program penanggulangan stunting di 13 kabupaten yang dilaksanakan oleh Badan Litbangkes tahun 2019 menunjukkan bahwa 6 dari 13 kabupaten telah melaksanakan rembuk stunting sampai di tingkat pemerintah kabupaten, yaitu Kabupaten Gorontalo, Cianjur, Lombok Tengah, Ketapang, dan Mamuju. Studi ini juga menunjukkan bahwa sudah ada lima kabupaten yang mempunyai SK tim penanggulangan stunting dari tingkat kabupaten sampai kecamatan (Kementerian Kesehatan RI, 2019b). Dalam hal koordinasi sampai ke tingkat desa, pelaksanaan pencegahan stunting di 5 Kabupaten di atas, belum semuanya membuat kebijakan yang sama dengan tujuan untuk memperkuat Desa.

Riset yang dilakukan oleh Pusat Riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan hasil bahwa kapasitas daerah dalam merencanakan, mengelola, dan memantau pelayanan gizi masih lemah. Dukungan teknis terbukti dapat memperkuat kapasitas daerah dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program gizi dengan lebih baik. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada koordinasi dari kelompok multi sektor yang telah terbentuk secara nasional masih sangat terbatas karena isu kepemimpinan. Hal ini dapat diatasi jika pimpinan daerah punya komitmen yang kuat dalam pencegahan stunting. Sejalan dengan hasil riset, merekomendasikan untuk meningkatkan koordinasi dan konvergensi lintas sektor, terutama di desa lokus stunting, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. Rekomendasi ini dapat menjadi masukan positif bagi pimpinan dalam membuat kebijakan.

Upaya-upaya untuk mengembangkan program inovasi spesifik lokal dan terobosan dalam penanganan stunting di 5 (lima) kabupaten, belum menunjukkan terlaksananya koordinasi pada level bawah, seperti dimasyarakat, pada kelompok ibu-ibu kader desa/bidan dan anak remaja khususnya perempuan. Namun upaya ini tidak hanya sebatas *business as usual* (BAU) perlu dilakukan sebagai *best practice* dan perlu dikonvergensi, seperti halnya program ini juga sejalan dengan program perbaikan yang dilakukan negara lain yaitu India, Thailand, Peru, Brazil, dan Bangladesh. Negara-negara tersebut dapat menurunkan prevalensi stunting secara signifikan (Levinson, Balarajan and Marini, 2013).

Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan multi sektor dalam pelaksanaan intervensi sensitif (diluar sektor kesehatan). Koordinasi lintas sektor dan lintas program kegiatan yang dilakukan akan menentukan konvergensi program yang dapat dilihat pada pelaksanaan intervensi gizi spesifik yang dilaksanakan oleh unsur dinas kesehatan seperti : Pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk ibu hamil dan remaja putri, imunisasi, pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, imunisasi bagi balita, kegiatan di pos yandu dan intervensi gizi sensitif yaitu air bersih dan sanitasi

lingkungan perumahan, fortifikasi dan ketahanan pangan, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB), pusat informasi dan konseling kesehatan remaja, layanan pendidikan anak usia dini, terpadu dengan posyandu. Begitu juga terhadap intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh perangkat daerah selain dinas kesehatan, seperti, pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan hidup di Dinas Pertanian, akses air bersih dan jamban keluarga di PUPR, sosialisasi Gemar makan Ikan bagi masyarakat (GEMARIKAN) di Dinas Perikanan, parenting bagi anak usia dini di dinas Pendidikan, PIK Remaja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB.

Koordinasi dilakukan secara dua arah antar sektor dan lintas sektor melalui arahan dari Bappeda selaku perangkat daerah yang mempunyai kewenangan mengkoordinasikan perangkat di daerah. Terdapat 2 (dua) tipe koordinasi yaitu (1) koordinasi vertikal yaitu kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya, (2) koordinasi horizontal yaitu : mengkoordinasikan tindakan-tindakan kegiatan penyatuan, penggalan yang dilakukan dalam organisasi yang setingkat. Peran pemimpin dalam melakukan aktifitas koordinasi menjadi sangat penting dalam membantu terwujudnya kesatuan dalam gerak dan komunikasi secara aktif dan dapat mempengaruhi orang lain dalam bertindak. Koordinasi yang dilakukan terpusat dan terpadu pada unit kerja Bappeda sebagai *leading sector*, sehingga konvergensi yang ingin dicapai di bawah arahan dan koordinasi Bappeda.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 440/1959/SJ tahun 2018 tentang intervensi Penurunan Stunting terintegrasi dan surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 669/III/2020 tentang Tim Koordinasi Penanganan Stunting di Provinsi Riau, surat Keputusan Bappenas nomor 42/M.PPN/HK/04/2020 tanggal 9 april 2020 tentang Perluasan Lokus penanganan Stunting Tahun 2021. Pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota menyambut kebijakan ini, hal ini dilakukan untuk melakukan aksi konvergensi melalui berbagai intervensi dalam menurunkan dan mencegah stunting balita.

Langkah-langkah koordinasi yang di ambil dalam percepatan penurunan stunting Balita di Provinsi Riau yaitu: (1) Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada aksi konvergensi percepatan penurunan stunting secara efektif, dengan melibatkan perangkat daerah lintas sektor; (2) Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten Kota hingga ke tingkat Desa/Kelurahan melalui SK Bupati/Walikota yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota serta memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan stunting di tingkat Kecamatan dan Desa, di bawah koordinasi Bappeda; (3) Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan dengan melibatkan tenaga kesehatan (dokter/bidan/tenaga gizi), PLKB Tim PKK,PPKBD, kader dan unsur masyarakat lainnya. (4) Membentuk SATGAS TPPS, yang berada di tingkat desa/Kelurahan, dalam melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penilaian kinerja khususnya aspek koordinasi pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting di 5 (lima) kabupaten, maka diperoleh kesimpulan bahwa pada masing-masing kabupaten, belum ada regulasi yang memperkuat desa dalam melaksanakan aksi konvergensi penurunan Stunting. Koordinasi dalam aksi Konvergensi Lintas Sektor di Desa Lokus Stunting baik secara vertikal maupun horizontal, dari pimpinan tertinggi, sampai ke tingkat desa melalui komunikasi dan koordinasi yang aktif antar pejabat pembuat komitmen dengan pelaksana di lapangan. Pemerintahan desa perlu didorong melakukan inovasi dalam melakukan koordinasi dalam pencegahan stunting sesuai karakteristik spesifik daerah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hal terkait lainnya adalah perbaikan terhadap data prevalensi stunting pada cakupan layanan, publikasi yang dilakukan merupakan hasil analisis data pengukuran pada tahun berkenaan, serta penentuan program kegiatan prioritas berdasarkan hasil review kinerja untuk tahun berikutnya.

Saran yang diberikan adalah mengoptimalkan koordinasi dalam aksi konvergensi lintas sektor dan lintas program dalam pencegahan stunting baik secara vertikal maupun horizontal, dari pimpinan tertinggi, sampai ke tingkat desa melalui komunikasi dan koordinasi yang aktif antar pejabat pembuat komitmen dengan pelaksana di lapangan. Mensinergikan dan memadukan program strategis lintas sektor perangkat daerah yang bertanggung jawab pada pelaksanaan intervensi sensitif, dengan cara berbagi peran agar tercipta konvergensi dan melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah pengampu Aksi Konvergensi penurunan Stunting.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bepeda Litbang Provinsi Riau dan Tim Penilai Kinerja Intervensi Penurunan Stunting Provinsi Riau yang telah memfasilitasi dalam pemberian informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. H. and Badan (2020) 'Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan', *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 28(1), pp. 213-224.
- Achadi, E. L., Achadi, A. and Aninditha, T. (2020) *Pencegahan Stunting: Pentingnya Peran 1000 Hari Pertama Kehidupan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fahrizanur, Kalalinggi, R. and Burhanudin, H. (2017) 'Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Paser', *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), pp. 1599-1612.
- Kementerian Kesehatan RI (2019a) *Laporan nasional Riskesdas 2018*.
- Kementerian Kesehatan RI (2019b) *Riset Evaluasi Program Nasional Percepatan Penanggulangan Stunting pada Kabupaten Prioritas*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI (2021) *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)*

- Kabupaten/Kota Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian PPN/Bappenas (2018) *Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan stunting*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Khairunisa, R. *et al.* (2022) 'Faktor Risiko Ibu pada Saat Hamil dengan Kejadian Stunting pada Anak Balita di Kota Pekanbaru', *Jurnal Kesehatan Global*, 5(3), pp. 150–160.
- Kustanto, A. (2021) 'the Prevalence of Stunting, Poverty, and Economic Growth in Indonesia: a Panel Data Dynamic Causality Analysis', *Journal of Developing Economies*, 6(2), p. 150. doi: 10.20473/jde.v6i2.22358.
- Levinson, F. J., Balarajan, Y. and Marini, A. (2013) *Addressing malnutrition multisectorally. What have we learned from recent international experience? Case studies from Peru, Brazil and Bangladesh*.
- Mitra, M. (2015) 'Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting (Suatu Kajian Kepustakaan)', *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2(6), pp. 254–261.
- Nita, Y. Y. and Bait, B. R. (2020) 'Buku Panduan : Perencanaan , Pelaksanaan , Monitoring Dan Evaluasi Program Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Desa', in, pp. 1–124.
- De Onis, M. *et al.* (2019) 'Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 years', *Public Health Nutrition*, 22(1), pp. 175–179. doi: 10.1017/S1368980018002434.
- Pemkab Banggai (2019) 'Implementasi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting terintegrasi di Kabupaten Banggai'. Jakarta: Bappenas.
- Pemkab Gorontalo (2019) 'Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gorontalo'. Jakarta: Bappenas.
- Permanasari, Y. *et al.* (2020) 'Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas', *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4), pp. 315–328. doi: 10.22435/mpk.v30i4.3586.
- Purnamasari, R. D., Sartika, R. A. D. and Sudarti, T. (2022) 'Current Intake and Infection Status were not Good Predictive Factors of Stunting among Children Aged 6-59 Months in Babakan Madang Sub-District, Bogor District, West Java, Indonesia', *Indonesian Journal of Public Health Nutrition*, 2(2), pp. 41–48. doi: 10.7454/ijphn.v2i2.5387.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (2018) *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*. Available at: http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis_2018/Sesi_1_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf.
- Vilcins, D., Sly, P. D. and Jagals, P. (2018) 'What it is and what it means | Concern Worldwide U.S.', *Annals of Global Health*, 84(4), pp. 551–562.
- Yenita, R. N. *et al.* (2021) 'Identification and analysis of stunting risk factors in children under three years of age in the area of kampar watershed', *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(1), pp. 149–157. doi: 10.3889/oamjms.2021.7091.